

**PERANAN KANTOR IMIGRASI KELAS I MALANG DALAM PENCEGAHAN
TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL BERDASARKAN UNDANG –UNDANG
NOMER 6 TAHUN 2011**

Jurnal Karya Ilmiah

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaaan

Dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Norman Tri Waluyo

0710110063



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2012

A. PERANAN KANTOR IMIGRASI KELAS I MALANG DALAM PENCEGAHAN TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL

B. ABSTRAK

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal berdasarkan Undang – undang nomer 6 tahun 2011. Hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya pengangguran membuat para tenaga kerja bersedia bekerja apa saja untuk dapat melanjutkan kehidupan. Salah satu pemecahannya diantaranya adalah menjadi Tenaga Kerja Indonesia. Adanya peluang menjadi Tenaga Kerja Indonesia merupakan suatu angin segar ditengah kondisi kehidupan mereka yang serba kekurangan. Karena banyaknya permintaan tenaga kerja dari luar negeri dan juga banyaknya masyarakat yang ingin menjadi tenaga kerja dengan prosedur dari imigrasi yang berbelit – belit dan mahal membuat para calon Tenaga Kerja Indonesia ini lebih memilih untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia Ilegal. Rumusan Masalah : 1. Bagaimana peranan Kantor Imigrasi kelas I malang untuk mencegah ada nya Tenaga Kerja Indonesia ilegal berdasarkan Undang-undang Nomer 6 tahun 2011 ? 2. Apa saja hambatan yang dihadapi Kantor Imigrasi kelas I Malang dalam dalam peranannya untuk mencegah adanya Tenaga Kerja Indonesia illegal berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 dan bagaimana upaya kantor Imigrasi kelas I Malang untuk mengatasi hambatan tersebut ?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis Sosiologis. Prosedur pengumpulan data dan pengolahan data menggunakan tehnik wawancara, observasi lapangan serta studi dokumen dan kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, langsung di lokasi penelitian. Data dianalisa dengan mempergunakan tehnik pengolahan data secara deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban bahwa untuk melakukan pencegahan terhadap Tenaga Kerja Indonesia Ilegal tidak cukup hanya dengan Pasal 1 ayat 13, 14, 15, dan 16 Undang – undang nomer 6 tahun 2011 yang berisi tentang Dokumen Perjalanan Republik Indonesia saja namun di dalam Dokumen Perjalanan Indonesia tersebut harus disertai dengan Sistem Terpadu Berbasis Biometrik (SPTBB) yang diatur di Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M 02-IZ.03.10 Tahun 2006 tentang Penerapan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik pada Surat Perjalanan Republik Indonesia agar Dokumen

Perjalanan Republik Indonesia tidak dapat dipalsukan, Salah satu usaha yang dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan maksud dan tujuan dalam proses pembuatan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) adalah menyeleksi dan menghindari terjadinya penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) dengan maksud dan dalih untuk kunjungan keluarga, kunjungan wisata ke Negara-negara penerima Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dimana penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) hanya dapat dibenarkan setelah semua persyaratan formal dan kebenaran materialnya misalnya kebenaran jati diri, nama, alamat, usia, kondisi fisik dan lain sebagainya telah diyakini dan tidak diragukan serta dalam hal tersebut tidak memberikan suatu dispensasi atau keringanan apapun kepada siapapun juga

Dalam hal ini pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) bagi calon tenaga kerja hendaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud disini yaitu mengenai persyaratan-persyaratan dalam mengajukan permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) hendaknya diperhatikan secara lebih teliti, karena banyak sekali pemalsuan-pemalsuan data yang dilakukan oleh para calon Tenaga Kerja. Selain itu, hendaknya Kantor Imigrasi Kelas I Malang dapat bertindak tegas apabila terdapat hal-hal yang mencurigakan dalam pengajuan permohonan paspor seperti misalnya penolakan permohonan paspor.

Untuk lebih meningkatkan koordinasi antar Kantor Imigrasi Kelas I Malang dengan Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang terkait dengan Tenaga Kerja Indonesia, maka hendaknya dilakukan pertemuan rutin yang dapat dilakukan setiap bulannya untuk membahas permasalahan-permasalahan yang muncul ataupun untuk mencari solusi dalam pemecahan masalah Tenaga Kerja Ilegal.

At the writing of this paper, the authors discuss the role of the Immigration Class I Malang in Indonesia Illegal Labor prevention by Law number 6 in 2011. This background by making the number of unemployed workers willing to work any job in order to continue living. One such solution is a Labor Indonesia. There are opportunities to Indonesian Manpower is a breath of fresh air amid the living conditions of deprivation. Due to the large demand for labor from abroad and also the number of people who want to be workers with the complicated procedure of immigration very difficult and expensive to make the Labor candidate Indonesia prefers to be Indonesian Workers Illegal. Problem formulation: 1. How

is the role of the Immigration class I was unfortunate to prevent its illegal under Indonesian Labor Law Number 6 in 2011? 2. What are the barriers faced grade I Malang Immigration Office in the role to prevent illegal by the Indonesian Labor Law No. 6 of 2011 and how the effort grade I Malang Immigration office to overcome these obstacles?

This study uses sociological juridical approach. Data collection procedures and data processing techniques using interviews, observations and field studies and literature documents that collect data by observing and recording systematically, directly at the sites. Data were analyzed by using data processing techniques in descriptive analysis.

Based on the results obtained answers that to take precautions against Indonesia Illegal Labor is not enough to Article 1, paragraph 13, 14, 15 and 16 of Law - Law number 6 in 2011, which contains about Travel Documents of the Republic of Indonesia alone, but at the Travel Documents Indonesia must be accompanied by Sistem,\ Photo Terpadu Berbasis Biometrik (SPTBB) administered in Rule of Law and Human Rights Minister No.M 02-IZ.03.10 2006 on the Implementation of the Integrated Photo System based on Biometric travel documents of the Republic of Indonesia to the Republic of Indonesia Travel Document can't be forged, one attempt was made to anticipate misuse intents and purposes in the manufacturing process of the Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) is to select and to avoid the issuance of travel Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) with intent and pretext for a family visit, tourist visits to States recipient of Indonesian Workers (TKI) that the issuance of the Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) can only be justified after all the formal and material truth as truth identity, name, address, age, physical condition, etc., and no doubt has been believed, and in the case of does not provide an exemption or relief of any kind to anyone.

In this case the provision of the Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) for potential labor should be in accordance with the legislation in force. What is meant here is the requirements in applying for Travel Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) should be looked at more closely, because a lot of data falsifications made by Labor candidates. In addition, the Immigration Office Class I Malang can act decisively if there are things that are suspicious in filing for a passport, such as a passport passport denial.

To further improve coordination between the Office of the Immigration Class I Malang Indonesia Suppliers Employment Services (recruitment) associated with Labor Indonesia, it

should be made to do regular meeting each month to discuss issues that arise or to find a solution in the problem-solving Illegal labor

C. Kata Kunci

1. Keimigrasian

Pengertian imigrasi berasal dari bahasa latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ketempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya *imigratio* dalam bahasa latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari satu negara untuk masuk kedalam negara lain. Pada hakekatnya emigrasi dan imigrasi itu menyangkut hal yang sama yaitu perpindahan penduduk antar negara, tetapi yang berbeda adalah cara memandangnya. Ketika seseorang pindah ke negara lain, peristiwa itu di pandang sebagai emigrasi, namun bagi negara yang didatangi orang tersebut peristiwa itu disebut sebagai peristiwa imigrasi.¹

Keimigrasian menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang no. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian adalah ihwal lalu lintas orang yang keluar atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya imigrasi mempunyai peranan penting dalam hal lalu lintas bagi orang yang akan keluar atau masuk wilayah Indonesia diantaranya adalah penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, pemberian izin keimigrasian dan melakukan pengawasan yang menyangkut keberadaan dan juga kegiatan yang dilakukan orang asing.

2. Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah pencegahan atau penolakan . Pencegahan juga dapat diartikan sebagai larangan yang bersifat sementara terhadap orang – orang tertentu untuk keluar wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu.²

¹ Wijayanti, Herlin, SH. MH, Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian, Bayu Media Publishing, Malang , 2011, hlm 129.

² Pasal 1 ayat 28 Undang - Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

Didalam penulisan karya tulis ini, pencegahan yang di maksud adalah usaha atau upaya yang di lakukan untuk mengantisipasi agar Tenaga Kerja Indonesia yang berstatus ilegal di harapkan tidak muncul di kemudian hari.

3. Tenaga Kerja Indonesia

Tenaga Kerja adalah setiap orang baik itu laki-laki maupun perempuan yang sedang dalam dan atau akan melakukan pekerjaan, baik didalam atau diluar suatu hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.³

Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.⁴

Di dalam perkembangannya, tenaga kerja ini di bagi menjadi 2 kelompok, yaitu :

1. Masuk, berada dan melakukan kegiatan/bekerja di Negara tujuan secara legal karena memiliki dokumen identitas diri dan dilindungi kontrak/perjanjian kerja dengan majikan ;
2. Masuk, berada dan melakukan kegiatan/bekerja di Negara tujuan secara ilegal karena tidak memiliki dokumen identitas diri tidak dilindungi secara kontrak/perjanjian kerja dengan majikan.

4. Ilegal

Ilegal adalah sesuatu yang tidak legal, tidak sesuai menurut hukum dan tidak sah. Sebagai contoh orang itu masuk ke Indonesia secara ilegal.⁵

5. Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Tempat pemeriksaan Imigrasi adalah pelabuhan, bandar udara, pos lintas batas atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat masuk atau luar wilayah Indonesia.⁶

Tempat Pemeriksaan Imigrasi dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, dan tidak semua Pelabuhan atau bandar udara ada Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam

³ Undang – Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.

⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

⁵ Sumber : <http://deskripsi.com/i/ilegal>

⁶ Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

artian hanya Pelabuhan atau bandar udara atau perbatasan yang tercantum dalam peraturan yang ada Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Tempat Pemeriksaan Imigrasi berada di bandar udara atau pelabuhan Internasional serta daerah perbatasan dengan negara tetangga misalnya Kalimantan dengan serawak Malaysia. Tempat Pemeriksaan Imigrasi sangat penting untuk mengawasi lalu lintas orang dari dan ke luar negeri. Setiap orang yang akan berangkat ke luar negeri akan diberikan tanda bertolak yaitu tanda tertentu yang diterakan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam surat perjalanan setiap orang yang akan meninggalkan wilayah Indonesia. Begitu juga untuk orang yang masuk ke wilayah Indonesia akan diterakan tanda tertentu pada surat perjalanannya.

6. Tenaga Kerja Indonesia Ilegal

Tenaga Kerja Indonesia Ilegal adalah Tenaga Kerja Indonesia yang masuk maupun keberangkatannya di suatu negara secara tidak sah, dapat dikelompokkan menjadi :

- i. *Illegal stay* : Orang yang mempunyai izin keimigrasian yang sah tetapi masa berlakunya habis, orang demikian disebut *over stay*.
- ii. *Illegal entry* : Orang yang masuknya kesuatu negara secara tidak sah, yaitu tidak melalui pemeriksaan pejabat imigrasi dengan menggunakan dokumen atau surat perjalanan dan atau visa paslu atau dipalsukan.
- iii. *Illegal entry* dan *illegal stay* : Orang yang baik masuknya maupun keradaannya secara tidak sah.⁷

7. Kantor Imigrasi

Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.⁸

8. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia.⁹

⁷ Juniarta, Hepi, Fungsi Imigrasi Untuk Mendukung Pelaksanaan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia, Akademi Imigrasi, Jakarta 2002, hlm 16.

⁸ Pasal 1 ayat 11 Undang – undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁹ Pasal 1 ayat 14 Undang – undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

9. Visa

Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.¹⁰

10. Perizinan

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang- undang atau peraturan perundangan untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan – ketentuan larangan peraturan perundang - undangan.¹¹

D. Pendahuluan

Kehidupan perekonomian yang sampai sekarang masih belum membaik di Indonesia banyak memunculkan berbagai permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu contohnya adalah mengenai banyaknya pengangguran yang muncul sebagai akibat karena kurang tersedianya lapangan pekerjaan yang ada. Pengangguran juga muncul akibat dari perusahaan-perusahaan besar yang memperkerjakan buruh dalam jumlah ratusan bahkan ribuan orang mengalami kebangkrutan karena krisis ekonomi yang menderita tiada akhir.

Krisis ekonomi yang menimpa Negara Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu juga telah memberikan pengaruh langsung pada bidang tenaga kerja yang sejak semula sangat rentan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di bidang ekonomi. Bagi masyarakat sendiri, terpuruknya perekonomian ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan mereka. Pengaruh yang muncul antara lain harga barang-barang meningkat tetapi penghasilan tetap bahkan terkadang kurang, banyaknya terjadi pemutusan hubungan kerja di banyak perusahaan dan banyak lagi masalah-masalah lain yang sampai sekarang ini belum ditemukan satu titik terang yang mengarah kepada pemulihan perekonomian Indonesia.

¹⁰ Pasal 1 ayat 18 Undang – undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

¹¹ Sutedi, Adrian, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 167 – 168.

Sebagai akibat dari banyaknya pengangguran itu sendiri membuat para tenaga kerja bersedia bekerja apa saja untuk dapat melanjutkan kehidupan agar berjalan kembali seperti semula. Salah satu pemecahannya diantaranya adalah menjadi Tenaga Kerja Indonesia. Adanya peluang menjadi Tenaga Kerja Indonesia merupakan suatu angin segar ditengah kondisi kehidupan mereka yang serba kekurangan.

Arus tenaga kerja ilegal yang cukup besar mencerminkan tiga hal, yaitu :

1. Masalah pengangguran dan keterbatasan kesempatan kerja di Indonesia sudah sangat kritis, sehingga banyak angkatan kerja yang terpaksa mengambil resiko tinggi yaitu dengan menjadi ilegal demi mengejar peluang kerja yang ada di luar negeri ;
2. Penghargaan pengusaha dan keluarga Indonesia terhadap pekerjaannya sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan jumlah gaji yang diterima oleh tenaga kerja tersebut ;
3. Pengelolaan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia memerlukan biaya tinggi harus melewati birokrasi yang rumit. Dikenakan keterbatasan dana dari calon tenaga kerja tersebut, maka banyak dari mereka mengambil jalan pintas dengan menjadi tenaga kerja ilegal.¹²

Mengingat Undang-undang nomor 6 tahun 2011 Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi berbagai perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di bidang Keimigrasian sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang baru yang lebih komprehensif serta mampu menjawab tantangan yang ada.

¹² Simanjuntak, Payman J, Mengatasi Tenaga kerja Ilegal ke Malaysia, Suara Pembaharuan Daily, 2004

Oleh karena itu peranan Imigrasi dalam pencegahan adanya Tenaga Kerja Indonesia yang ilegal sangatlah penting. Dalam rangkaian tugas tersebut, imigrasi mempunyai peran yang dapat diterapkan dalam proses pelayanan dengan di berikannya kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada calon tenaga kerja. Selain memiliki peranan dan pelayanan, imigrasi juga berperan dalam proses keberangkatan dan kedatangan bagi setiap Tenaga Kerja Indonesia yang akan pergi keluar negeri maupun pulang ke Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis mengambil judul Peranan kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal berdasarkan Undang – undang normor 6 tahun 2011.

E. Masalah

1. Bagaimana peranan Kantor Imigrasi kelas I malang untuk mencegah ada nya Tenaga Kerja Indonesia ilegal berdasarkan Undang-undang Nomer 6 tahun 2011 ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Kantor Imigrasi kelas I Malang dalam dalam peranannya untuk mencegah adanya Tenaga Kerja Indonesia illegal berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 dan bagaimana upaya kantor Imigrasi kelas I Malang untuk mengatasi hambatan tersebut ?

F. Metode

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini diperoleh dari studi kepustakaan dan digunakan sebagai kerangka untuk memudahkan penulisan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, tehnik pengumpulan data, populasi dan sampel, analisis data, dan definisi operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penulisan penelitian ini yang di dalamnya menguraikan jawaban dari permasalahan. Bab ini di bagi menjadi dua bagian sesuai dengan permasalahan yaitu bagaimana peranan Kantor Imigrasi Kelas I Malang Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 dalam pencegahan Tenaga Kerja Indonesia yang berstatus illegal dan usaha-usaha apa saja yang telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam rangka pencegahan adanya TKI ilegal.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang dapat penulis berikan kepada pihak-pihak yang dapat penulis berikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penulisan penelitian ini.

G. Pembahasan

1. Peranan Kantor Imigrasi Klas I Malang Dalam Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011

Kantor Imigrasi merupakan unit pelaksanaan teknis di dalam bidang keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berada di bawah Kepala Kantor Wilayah dan juga harus bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. Sebagaimana yang di sebutkan pada Undang-undang nomor 6 tahun 2011 pasal 4 (ayat 1) Keimigrasian membentuk kantor Imigrasi di kabupaten, kota, atau kecamatan salah satunya di kota Malang untuk melaksanakan fungsinya.

Pemberian dokumen keimigrasian kepada Tenaga Kerja Indonesia dalam hal ini Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) pada dasarnya merupakan perwujudan perlindungan hak asasi manusia untuk melakukan perjalanan keluar negeri dengan maksud dan tujuan apapun selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai pemberi fasilitas dalam penempatan Tenaga Kerja Indonesia, Imigrasi berkewajiban memberikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) kepada setiap warga negaranya yang akan melakukan perjalanan keluar negeri sepanjang tidak ada hal-hal yang memberatkan. Kewajiban yang dilakukan ini juga merupakan perwujudan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

1.1 Melaksanakan Kewajiban Kantor Imigrasi Kelas I Malang

Kewajiban bagi Kantor Imigrasi Kelas I Malang sebagai pihak terdepan dalam menjaga pintu gerbang Negara melalui kegiatan :

- a. Pemberian pelayanan dalam proses penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang diperuntukan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya.

1) Prosedur Pengajuan Paspor

Para calon Tenaga Kerja Indonesia harus mempersiapkan dan menjalani syarat – syarat dan proses – proses yang telah ditetapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Malang.

a) Syarat Pengajuan Permohonan Paspor

Mengenai syarat – syarat pengajuan permohonan paspor bagi Tenaga Kerja Indonesia pada dasarnya sama dengan syarat pengajuan permohonan paspor biasa atau umum dengan melampirkan¹³:

1. KTP / Resi KTP
2. Kartu Keluarga
3. Akta Lahir
4. Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia
5. Surat ganti nama
6. Surat sponsor

Cuma bedanya pada Tenaga Kerja Indonesia :

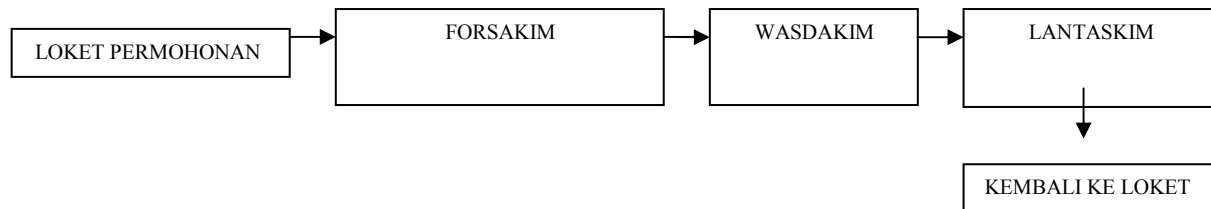
1. Harus mempunyai izin dari seksi Lalulintas Keimigrasian (karena KTP daerah)
2. Harus mendapat izin dari Balai Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Agar mendapatkan rekomendasi pengeluaran paspor oleh Direktorat Lantaskim dan agar Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI) dari Kementrian Tenaga Kerja dapat di keluarkan.
3. Harus mendapat surat rekomendasi dari Kementrian Tenaga Kerja.

¹³ Juniarta, Hepi, Fungsi Imigrasi Untuk Mendukung Pelaksanaan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia, Akademi Imigrasi, Jakarta 2002, hlm 16.

b) Proses Permohonan Paspor

Sedangkan proses permohonan paspor di bagi menjadi 3 bagian, yaitu:

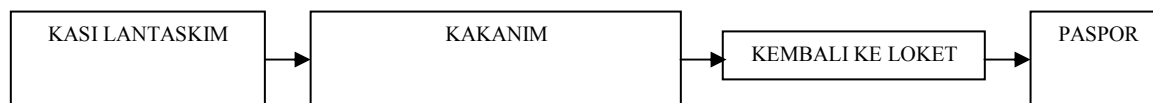
1. Proses Persetujuan



2. Proses Pelaksanaan



3. Proses Penyelesaian



b. Pemberian pelayanan perpanjangan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dinegara-negara tempat Tenaga Kerja Indonesia bekerja.

c. Pelayanan dalam menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi Tenaga Kerja Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk melakukan perjalanan pulang ke Indonesia.¹⁴

1.2 Melaksanakan Proses Wawancara di Kantor Imigrasi Kelas I Malang

Salah satu usaha yang dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan maksud dan tujuan dalam proses pembuatan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) adalah menyeleksi dan menghindari terjadinya penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) dengan maksud dan dalih untuk kunjungan keluarga, kunjungan wisata ke Negara-negara penerima Tenaga Kerja

¹⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Imigrasi Kelas I Malang pada tanggal 27 agustus 2012

Indonesia (TKI) dimana penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) hanya dapat dibenarkan setelah semua persyaratan formal dan kebenaran materialnya misalnya kebenaran jati diri, nama, alamat, usia, kondisi fisik dan lain sebagainya telah diyakini dan tidak diragukan serta dalam hal tersebut tidak memberikan suatu dispensasi atau keringanan apapun kepada siapapun juga.¹⁵

Untuk dapat memperoleh data-data tersebut, dapat dilakukan pada saat proses wawancara bagi pemohon Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Wawancara ini memegang peranan penting dalam proses pengeluaran Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) karena petugas imigrasi dapat melakukan wawancara langsung dengan pemohon dan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai alasan-alasan yang bersangkutan membuat Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI). Apabila terjadi keraguan dalam memberikan jawaban akan langsung dapat diketahui sehingga petugas imigrasi dapat segera memutuskan apakah yang bersangkutan dapat memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) atau tidak.¹⁶

Dapat diketahui bahwa Tenaga Kerja Indonesia yang akan berangkat ke Luar negeri haruslah dilengkapi dengan dokumen imigrasi yang sah. Pada dasarnya Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau paspor yang di gunakan oleh Tenaga Kerja Indonesia tersebut untuk berangkat ke luar negeri adalah paspor paspor biasa 24 halaman.

2. Hambatan yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam Pencegahan Tenaga Kerja Ilegal

Dalam melaksanakan tugasnya untuk mencegah terjadinya Tenaga Kerja Ilegal Kantor Imigrasi Kelas I Malang memiliki hambatan, hambatan tersebut adalah:

- a. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang masih sering memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI).
- b. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang masih sering menyalahgunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI).

¹⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Imigrasi Klas I Malang pada tanggal 27 agustus 2012

¹⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Imigrasi Klas I Malang pada tanggal 27 agustus 2012.

3. Upaya Kantor Imigrasi Kelas I Malang Dalam Menanggulangi Hambatan - Hambatannya.

Dikaitkan dengan permasalahan mengenai tenaga kerja ilegal, Kantor Imigrasi Kelas I Malang mempunyai peran dalam mengantisipasi adanya tenaga kerja ilegal yaitu didalam proses pengeluaran Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI). Pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada warga negaranya di luar negeri.

Karena Dokumen Perjalanan Republik Indonesia merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh seseorang baik itu Tenaga Kerja Indonesia atau non Tenaga Kerja Indonesia yang ingin melakukan perjalanan luar negeri maka yang bersangkutan akan menggunakan cara-cara baik itu ilegal dalam artian memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) dengan melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun dengan cara ilegal misalnya dengan memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) tersebut.

Untuk mengatasi hambatannya Kantor Imigrasi Kelas I Malang melakukan

- 1) Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik.
- 2) Melaksanakan proses wawancara kepada setiap calon Tenaga Kerja Indonesia.

a. Melalui Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik

Untuk menghindari upaya pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) tersebut, maka Imigrasi menggunakan suatu inovasi baru dalam proses pembuatan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) yaitu dengan menggunakan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik (SPTBB) pada Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI). Yang dimaksud dengan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik (SPTBB) disini adalah pengambilan photo dan sidik jari pemohon Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) dengan mempergunakan perangkat Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik (SPTBB) guna memenuhi standar *International Civil Aviation Organization* (ICAO) serta

dapat terintegrasi langsung dengan rencana Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Penggunaan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik (SPTBB) ini adalah untuk menggantikan sistem photo terpadu yang sebelumnya yaitu menggunakan *Machine Readable Passport* (MRP) yang mana pencetakan data identitas pemegang Dokumen Perjalanan Republik Indonesia masih menggunakan media stiker yang ditempelkan pada halaman data Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI).¹⁷

b. Melalui proses wawancara kepada setiap calon Tenaga Kerja Indonesia

Selain menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI), para calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) juga banyak melalui prosedur resmi dalam memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI). Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ini biasanya mengajukan permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) dibawah arahan dari para calo Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut dan yang menjadi ciri khas bahwa pemohon tersebut adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI), mereka akan mengatakan bahwa maksud dan tujuan mengajukan permohonan paspor adalah ingin mengunjungi sanak saudara yang ada di luar negeri. Dan hal ini sudah sangat sering sekali terjadi di Kantor Imigrasi Kelas I Malang¹⁸.

Setelah upaya-upaya pencegahan telah di lakukan hendaknya dari pihak pengguna jasa Tenaga Kerja Indonesia tidak membuka peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan oleh para Penyalur jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) untuk melakukan pengiriman Tenaga Kerja Ilegal. Karena yang selama ini terjadi, pihak pengguna jasa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sepertinya melegalkan adanya penyelundupan Tenaga Kerja Ilegal, dikarenakan banyak keuntungan yang dapat diperoleh, diantaranya pihak pengguna tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk memberikan upah kepada para Tenaga Kerja Indonesia Ilegal. Hal ini dapat terjadi karena apabila Tenaga Kerja Indonesia Ilegal tersebut menolak jumlah gaji yang diberikan maka pihak pengguna akan melaporkan kepada pihak berwajib

¹⁷ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M 02-IZ.03.10 Tahun 2006 tentang Penerapan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik pada Surat Perjalanan Republik Indonesia.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Imigrasi Klas I Malang pada tanggal 27 agustus 2012

bahwasannya tenaga kerja tersebut merupakan Tenaga Kerja Ilegal yang mengakibatkan para tenaga kerja tersebut ditangkap dan akan dideportasi ke Negara asal yaitu Indonesia. Dari pihak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) itu sendiri.

H. Penutup

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan pada bab pembahasan dapat diambil suatu kesimpulan yaitu :

1. Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam usahanya untuk mencegah adanya Tenaga Kerja Ilegal :
 - a. Melaksanakan Kewajiban Kantor Imigrasi Kelas I Malang
 - i. Pemberian pelayanan dalam proses penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang diperuntukan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya.
 - ii. Pemberian pelayanan perpanjangan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dinegara-negara tempat Tenaga Kerja Indonesia bekerja.
 - iii. Pelayanan dalam menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi Tenaga Kerja Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk melakukan perjalanan pulang ke Indonesia.
 - b. Melaksanakan Proses Wawancara di Kantor Imigrasi Kelas I Malang

Salah satu usaha yang dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan maksud dan tujuan dalam proses pembuatan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) adalah menyeleksi dan menghindari terjadinya penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) dengan maksud dan dalih untuk kunjungan keluarga, kunjungan wisata ke Negara-negara penerima Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dimana penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

(DPRI) hanya dapat dibenarkan setelah semua persyaratan formal dan kebenaran materialnya misalnya kebenaran jati diri, nama, alamat, usia, kondisi fisik dan lain sebagainya telah diyakini dan tidak diragukan serta dalam hal tersebut tidak memberikan suatu dispensasi atau keringanan apapun kepada siapapun juga.

2. Kantor Imigrasi Kelas I Malang juga memiliki hambatan untuk menjalankan peranannya dalam usahanya adanya Tenaga Kerja Ilegal, hambatannya ialah :
 - a. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang masih sering memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI).
 - b. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang masih sering menyalahgunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI).
3. Upaya Kantor imigrasi Kelas I Malang untuk menanggulangi hambatan-hambatannya:
 - a. Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik

Untuk menghindari upaya pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) tersebut, maka Imigrasi menggunakan suatu inovasi baru dalam proses pembuatan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) yaitu dengan menggunakan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik (SPTBB) pada Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI). Yang dimaksud dengan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik (SPTBB) disini adalah pengambilan photo dan sidik jari pemohon Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) dengan mempergunakan perangkat Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik (SPTBB) guna memenuhi standar *International Civil Aviation Organization* (ICAO) serta

dapat terintegrasi langsung dengan rencana Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).

b. Melalui proses wawancara kepada setiap calon Tenaga Kerja Indonesia.

Menyeleksi dan menghindari terjadinya penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) dengan maksud dan dalih untuk kunjungan keluarga, kunjungan wisata ke Negara-negara penerima Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dimana penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) hanya dapat dibenarkan setelah semua persyaratan formal dan kebenaran materialnya misalnya kebenaran jati diri, nama, alamat, usia, kondisi fisik dan lain sebagainya telah diyakini dan tidak diragukan serta dalam hal tersebut tidak memberikan suatu dispensasi atau keringanan apapun kepada siapapun juga.

SARAN

Dari kesimpulan yang disampaikan diatas, ada beberapa saran yang diharapkan dapan menjadi pertimbangan Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan usaha untuk mengantisipasi atau mencegah adanya Tenaga Kerja Ilegal. Saran-saran yang ingin penulis sampaikan antara lain:

1. Dalam hal ini pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) bagi calon tenaga kerja hendaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud disini yaitu mengenai persyaratan-persyaratan dalam mengajukan permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) hendaknya diperhatikan secara lebih teliti, karena banyak sekali pemalsuan-pemalsuan data yang dilakukan oleh para calon Tenaga Kerja.

2. Untuk lebih meningkatkan koordinasi antar Kantor Imigrasi Kelas I Malang dengan Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang terkait dengan Tenaga Kerja Indonsia, maka hendaknya dilakukan pertemuan rutin.